

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Agus Dwiyanto,(2017) *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agus Wibowo,(2023), *Hukum Administrasi Publik*,Yayasan Prima Agus Teknik.
- Bagir Manan, (2016), *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- M. Ridwan Khairandy,(2021), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara* ,Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*,Mataram University Press.
- Philipus M. Hadjon, (2007),*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon,(2021), *Hukum Administrasi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Philipus M.Hadjon ,(2019), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Yogyakarta:Gadjah Mada University Pers.
- Sinambela, Lijan Poltak, (2019), *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*,Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin,(2011), *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang; Stara Press.
- Siti Rocheani, (2023), *Pembangunan Pertanian Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto,(2006),*Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sondang P. Siagian, (1989), *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Arja Sadjiarto,(2000),*Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, Nomor 2.
- Fajar Tri Kesuma, (2025), *Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Asas Kecermatan Pada Putusan Nomor :123/G/2019/PTUN-BDG* ,Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,Volume 12 Nomor 5.

- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). *Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance*. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, Volume 19 Nomor 1.
- Kezia M. Layuck,(2020),*PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 2015* , Lex Administratum, Volume. 8 Nomor 3.
- Lingga Abi Rahman,(2024), *Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara*, Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Volume 1 Nomor. 4.
- Maria Ersalina Meme,(2019),*PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH* , Volume 18 Nomor 10.
- melalui Kartu Petani di Desa Galung*, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID), Volume 4 Nomor 8.
- Solechan,(2019), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Nomor 3.
- Sri Hery Susilowati,(2016), *Urgensi dan Opsi perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14 Nomor 2, Pusat Sosial dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Bogor.
- Zulhayyir , Nurlia,(2025),*Pelaksanaan Program Distribusi Pupuk Bersubsidi*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 30.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011. Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan
- PMK Nomor 209/PMK.02/2013 Tentang cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk.
- Perpres Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.

Sumber Lain (Laporan, Skripsi, Dokumen Pemerintah, dan Data Statistik)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa,(2024), *Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka*, BPS Kab. Gowa, volume 14.